

Pariwisata dan Perubahan Persepsi atas Hutan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Andika Nur Perkasa

Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini membahas implikasi pertumbuhan minat wisatawan pada jenis wisata alam di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) bagi masyarakat Tengger Ranu Pani yang tinggal dalam wilayah *enclave* TNBTS. Studi ini menitik beratkan pada persepsi masyarakat atas hutan yang menjadi daya tarik utama para wisatawan untuk berkunjung. *Dwelling perspective* digunakan untuk menjabarkan proses pembentukan persepsi tersebut dari berbagai aktor beserta tindakan terkait. Proses pembentukan persepsi akan hutan juga tidak terlepas dari sejarah pembentukan ruang tersebut oleh pemerintah, baik fungsi hingga kepemilikan. Studi ini kemudian menggunakan analisis deret waktu yang menitik beratkan pada aspek keruangan. Hasil dari studi ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi atas hutan bagi masyarakat disebabkan kecenderungan pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber pemasukan berkelanjutan bukan untuk tujuan konservasi.

Kata kunci: *dwelling perspective*, masyarakat *enclave*, persepsi hutan, Tengger, dan wisata alam.

Abstract

This paper examines the implication on growing interest of tourist on kind of travel nature in Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) for the Tenggernese who live in *enclave* area TNBTS. This study is prioritized on public perception of forests as the main attraction to tourist to visit. *Dwelling perspective* used to announce process establishing a perception of forest from the various actors and related actions. The establishing process of forest perception cannot be separated from space forest history formation by the government, either its function or ownership. This study then using conjuncture analysis prioritized on the life space aspect. The result of this study indicates a shift in perception of forest for the community due to the tendency of government to make tourism as a source of sustainable income not for conservation purposes.

Keywords: *dwelling perspective*, *enclave* community, perception of forest, Tenggernese, travel nature.

PENDAHULUAN

Desa Ranu Pani merupakan salah satu wilayah *enclave* yang masuk pada kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Orang Tengger yang bermukim di desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Baik yang memiliki lahan ataupun yang tidak (buruh tani). Lahan pertanian ladang masyarakat seperti yang dikatakan Hefner (1999, hal. 25, 81) masuk pada kategori pertanian lahan kering (*tegalan*) yang sangat rawan degradasi. Komoditas utama ladang masyarakat disini adalah tanaman sayur seperti kubis dan kentang. Ladang yang dimiliki ladang masyarakat berjarak tidak jauh dari rumah tempat mereka tinggal dan bermukim. Ladang yang tidak sampai ke dalam hutan menjadikan penduduk Ranu Pani memiliki intensitas yang relatif kecil untuk eksploitasi hutan. Hanya sebatas pengambilan kayu untuk keperluan memasak dan juga penghangat sebagai kayu bakar. Dengan kontur ketinggian yang mencapai 2000-2200 meter diatas permukaan laut (mdpl), tidak memungkinkan untuk tanaman kayu komersil tumbuh baik di wilayah ini (Radecki, 2006, hal. 41-42).

Tidak adanya potensi eksploitasi hutan untuk kebutuhan komersil membuat masyarakat tidak pernah menggantungkan diri atau sekedar berharap akan kemungkinan mendapatkan hasil dari ruang ini. Beberapa catatan yang disunting oleh Tania Murray Li (2002) terlihat proses perubahan yang terjadi di kawasan dataran tinggi –dan pedalaman, terjadi justru akibat dari konsumsi orang-orang yang berada di dataran rendah yang menjadi pusat-pusat pemerintahan. Salah satu pemicu adanya perubahan di kawasan Ranu Pani ini adalah tersebar luasnya berita-berita mengenai keindahan alam dan juga daya tarik untuk mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Pencitraan atas kawasan ini tersebar melalui berbagai media, mulai cerita dari seorang senior kelompok pecinta alam, biografi seorang aktivis di tahun 1960-an, novel fiksi, hingga film layar lebar. Memasuki era sosial media semakin massif pencitraan atas kawasan ini dan menjadikannya semakin populer bahkan wajib untuk dikunjungi para wisatawan.

Berangkat dari latar belakang tersebut tulisan ini bertumpu pada dua pertanyaan penelitian, (1) apa implikasi dari tingginya pertumbuhan pariwisata di sekitar kawasan Ranu Pani? dan, (2) bagaimana proses terjadinya implikasi tersebut?

Dalam melihat terjadinya proses hingga menghasilkan implikasi tertentu, studi ini menggunakan kerangka *dwelling perspective* yang diajukan oleh Tim Ingold (2000). Ingold berpandangan bahwa hubungan yang ada didalam lingkungan berlangsung sangat dialektis. Proses adaptasi yang ada kemudian akan diartikan bukan sebagai sebuah proses penundukan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang adidaya, melainkan sebagai sebuah proses saling melengkapi antar unsur yang membentuk kehidupan. Proses tersebut menghasilkan *landscape* sebagai citra visual dari kenampakan di sebuah tempat.

Kehidupan kemudian dibangun atas dasar hubungan antar manusia dimana lingkungan menjadi obyek yang dinegosiasikan, diolah, dan diubah dengan dasar pertukaran persepsi dan aksi dari manusia itu sendiri. Dalam memahami integrasi antara manusia dan lingkungan, relasi antar organisme yang ada dalam cakupan lingkungan mengantar pada persepsi dan aksi pada bentuk lainnya. Relasi timbal balik yang terjadi dengan dua pola tersebut akan menunjukkan dinamika kehidupan masyarakat. Adanya relasi yang bersifat dialektis tersebut mengakibatkan persepsi dan aksi manusia terhadap lingkungan tidak pernah selesai.

Lingkungan seperti layaknya struktur bangunan “... *are never complete but continually under-construction...*” (Ingold, 2000, hal. 154).

Setelah diketahui dalam kehidupan manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya selalu membutuhkan referensi yang selalu berulang dan tarik menarik antara sesama manusia ataupun non-manusia, maka ada tindakan nyata sehingga tidak hanya tersimpan sebagai memori. Ini yang kemudian disebut sebagai *landscape* oleh Ingold sebagai hasil hubungan tarik-menarik tersebut. Kunci dari konsepsi ini berada pada indera penglihatan. Bentuk dan makna dari pikiran manusia yang selalu berubah menuntut pembangunan ini tidak pernah sempurna. Penekanan *landscape* berada pada hasil dari konstruksi relasi manusia dengan lingkungan. Hasil yang membentuk kenampakan tersebut akan dilihat sebuah “... *painted representation ...in particular cultural context.*” (Hirsch, 1995, hal. 3). Dalam melihat tindakan satu kelompok masyarakat dengan latar belakang tertentu pada suatu ruang kolektif, maka akan terlihat kompleksitas secara historis antara tarik ulur persepsi hingga berimplikasi pada perlakuan yang terus berulang. Pengaruh yang terkuat adalah antara manusia dan non-manusia mana yang memiliki “jaringan” lebih luas hingga mempengaruhi persepsi.

Koneksi antara manusia yang lebih cepat dalam melakukan pergerakan ketimbang non-manusia membuat persepsi atas ruang dibawah kuasa manusia. Munculnya berbagai ide *fantasi hijau* (Darmanto & Setyowati, 2012, hal. 194) kemudian didukung menjamurnya kelompok-kelompok pecinta alam (Tsing, 2005, hal. 121) di kota-kota besar yang dengan segera bergerak ke tempat yang mereka sebut hutan rimba. Mulai dari dekade 1980-an hingga saat ini, ide fantasi hijau dan kelompok-kelompok pecinta alam ini memainkan peran penting atas penciptaan persepsi atas ruang yang dinamakan hutan. Atas dasar-dasar kejenuhan hidup di kota dan menjadikan hutan sebagai ruang yang dibayangkan penuh ketenangan, “... *enjoying wild and free nature*” (Tsing, 2005, hal. 125). Semakin tingginya kebutuhan untuk melakukan perjalanan wisata, hutan di sekitar Ranu Pani tidak pernah sepi setiap harinya.

Kegiatan wisata dalam kacamata posmodern merupakan (dan menjadikan) segala aktivitas berlawanan dengan kehidupan sehari-hari (Urry dalam Burns, 2005, hal. 28). Hal ini tidak terbatas hanya pada aktivitas. Tempat tidak luput dari pembalikan logika dalam wisata ini. Seperti layaknya domino, masyarakat sekitar yang lebih dekat dengan tujuan-tujuan wisata ini juga terpengaruh atas pembalikan logika ini. Perspektif historis dalam tulisan ini akan menjabarkan keterkaitan-keterkaitan berbagai aktor dalam adanya implikasi pariwisata di Ranu Pani yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Hasil data yang disajikan berbentuk kualitatif dengan uraian deskriptif. Lama waktu penelitian ini mengikuti izin yang diterbitkan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) adalah 6 bulan terhitung dari tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 7 Desember 2015. Pengumpulan sumber data primer dengan cara tinggal menetap di Ranu Pani selama 45 hari penuh disertai dengan kunjungan singkat selama satu hari yang dilakukan kurang lebih selama 14 hari dengan interval 2 hari sekali. Sisa waktu dari penerbitan izin tersebut digunakan untuk mengumpulkan sumber data sekunder berupa jurnal, buku, ataupun sumber lain yang relevan.

Sumber data primer didapatkan lewat informan yang telah ditentukan kriterianya dengan mengelompokkan kedalam beberapa kategori sosial. Penentuan informan hanya dengan

kategori tetapi tidak langsung merujuk pada spesifik nama. Dalam proses penggalian data, informan diajukan pertanyaan terbuka sehingga membiarkan informan bertutur tentang apa yang menjadi minat atau kepentingannya berkaitan dengan ide pokok pertanyaan tersebut. Seperti pada penelitian etnografi pada umumnya aspek utama yang hendak dicari merupakan domain (Spradley, 2007, hal. 151-157) yang didapatkan lewat wawancara mendalam (*in depth interview*), dokumentasi, dan observasi partisipasi (*participant observation*).

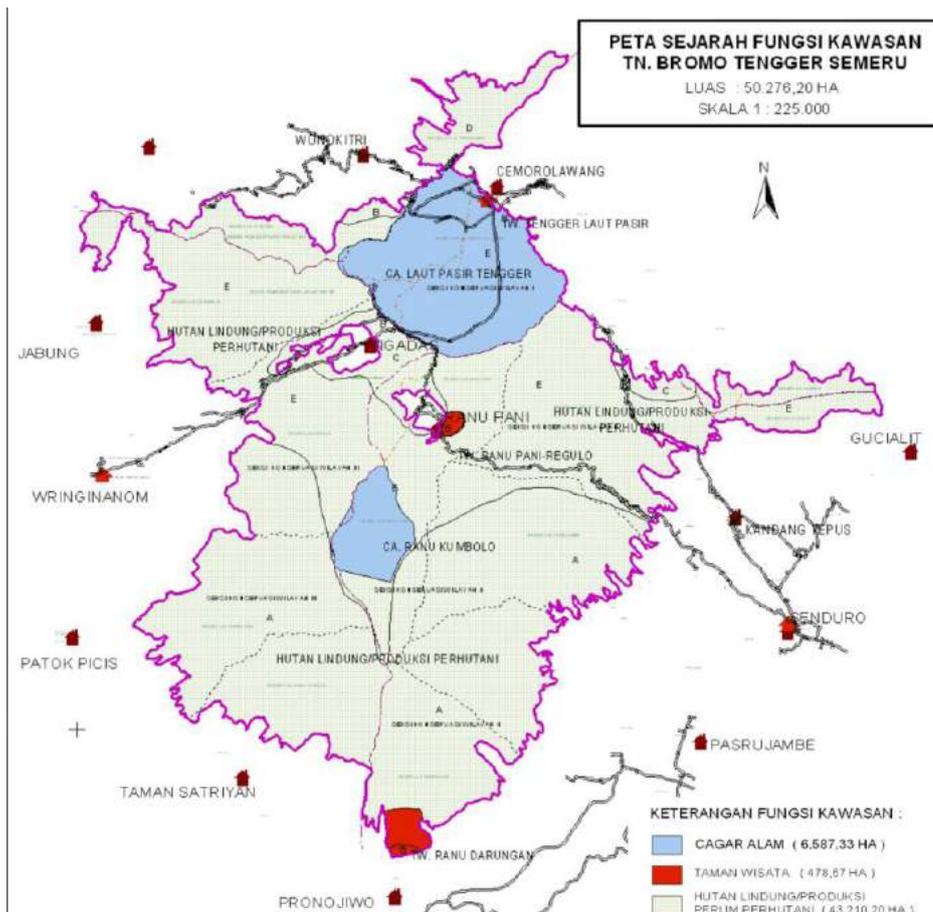
Cakupan dari informan yang memiliki beragam mata pencaharian, usia, agama, dan tentunya orientasi politik dirasa sangat memperkaya penelitian ini. Pada penelitian yang menempatkan peneliti pada suatu wilayah secara intensif, berbagi imajinasi dan pengetahuan adalah suatu hal yang mutlak terjadi (Cragg & Cook, 2007, hal. 12). Untuk mendukung proses pertukaran tersebut, dokumentasi lewat cuplikan foto akan memperkuat memperkaya hasil penelitian ini. Selain itu ada data sekunder yang digunakan berupa peta, jurnal, literatur terkait, serta karya-karya populer seperti novel, film, dan lagu. Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan kerangka metode etnografi dan dengan demikian diharapkan menjadi satu kesatuan sebagai sumber heterogenitas analitis dan menjanjikan (Tsing, 1998, hal. 423-424).

MEMANDANG HUTAN LEWAT NEGARA

Mencermati sejarah berdirinya kawasan hutan yang dilindungi negara saat ini tidak lepas dari peraturan masa kolonial Belanda. Sejarah ide dan gerakan konservasi pada era kolonial Belanda lebih dilandasi tujuan melindungi kehidupan orang-orang Belanda di Indonesia. Peter Boomgaard mencatat adanya korelasi antara jumlah kawasan yang didirikan sebagai *nature and wildlife reserve area* dengan kepadatan orang-orang Belanda pada suatu pulau di Indonesia (Boomgaard, 1999, hal. 258). Sebagai contoh di Jawa dengan kepadatan penduduk dari golongan orang Belanda 316 orang/km² ditetapkan 70 area konservasi, sedangkan di Kalimantan dengan kepadatan 4 orang/km² hanya ditetapkan 7 area konservasi (Boomgaard, 1999, hal. 258, 275) padahal Kalimantan memiliki kawasan hutan lebih luas dibanding Jawa.

Ide dan gerakan konservasi pada masa kolonial Belanda dimulai sekitar tahun 1890-an. Pemerintah pada masa itu lewat *Forestry Service* menetapkan banyak kawasan hutan pada masa awal tindak lanjut masalah konservasi. Banyak prediksi mengenai alasan kawasan hutan yang menjadi target awal kawasan yang dilindungi, salah satunya adalah mengatasi masalah-masalah hidrologi seperti pengendalian banjir (Boomgaard, 1999, hal. 262). Hal itu pula yang mendorong pemerintah kolonial Belanda menutup kawasan hutan untuk pembukaan ladang baru pada tahun 1910 di kawasan Pegunungan Tengger (Hefner, 1999, hal. 95). Kawasan Pegunungan Tengger yang terdiri dari lembah-lembah dengan kemiringan curam membuat kota-kota disekitarnya merasa cukup terancam bahaya tanah longsor ataupun banjir.

Setelah era kolonial Belanda tidak lagi berkuasa di Indonesia, pemerintah mendirikan Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan. Pasca merdeka, kawasan hutan dibuat zonasi sesuai tujuan dan fungsi yang dirasa dapat dimanfaatkan, seperti hutan produksi, suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung, dan sebagainya. Kawasan Pegunungan Tengger mendapat jatah sebagai wilayah dengan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Taman Wisata, dan juga Cagar Alam. Ada 2 Cagar Alam dan 2 Taman Wisata di kawasan ini yaitu Cagar Alam Lautan Pasir dan Ranu Kumbolo serta Taman Wisata Ranu Pani dan Ranu Darungan.



Peta 1.1 Peta Sejarah Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. (Sumber: BBTNBS dengan penyesuaian)

Pandangan negara atas hutan pada masa ini tetap berdasarkan atas peninggalan Belanda. Hanya sedikit perbedaan di kawasan hutan di sekitar Ranu Pani pada dekade 1960-an pernah dilakukan pembukaan lahan untuk tujuan *tumpangsari*. Model pertanian ini tidak mengharuskan adanya pengalih fungsian lahan secara keseluruhan dari hutan menjadi ladang, hanya memperbolehkan para petani dengan minim atau tanpa akses pada lahan untuk menanam tanaman pangan bukan komersil.

Dapat dikatakan hutan di kawasan Ranu Pani tidak populer dan strategis. Kemiringan tanah yang curam, berada di wilayah yang cukup tinggi, dan cuaca yang cenderung dingin (Fath, 2013, hal. 48) membuat tidak ada perkebunan selain sayuran tumbuh disini. Tidak seperti wilayah dibawahnya yang dapat ditanami buah-buahan (Suryanata, 1999), wilayah Ranu Pani cenderung sulit untuk menumbuhkan perekonomian lewat sektor pertanian atau perkebunan intensif.

Acuan dalam tata batas yang digunakan pemerintah republik atas kawasan Pegunungan Tengger tetap berdasar pemerintah kolonial Belanda. Kawasan ini dikatakan menjadi salah satu wilayah perlindungan alam terluas yang pernah dibuat pemerintah kolonial Belanda dan menjadikan pengawasannya cukup lemah karena jumlah petugas tidak memadai (Boomgaard, 1999, hal. 274). Model *tumpangsari* yang dilakukan pada kawasan hutan mudah dijumpai (Peluso, 2006) pada masa sebelum adanya Taman Nasional di Indonesia.

Pengawasan dan pengaturan yang buruk terhadap kawasan hutan ditambah minimnya kepentingan pengelolaan berlandaskan konservasi membuat area perlindungan alam kurang terpelihara dan cenderung rentan eksploitasi (Wessing, 1995, hal. 194). Walaupun pada masa pengelolaan Perhutani sudah dinobatkan sebagai Taman Wisata, namun *jagawana*¹ yang bertugas masa itu tidak memungut tarif bagi wisatawan kecuali menggunakan jasa *porter* atau *guide* dari masyarakat setempat.

Hutan yang cenderung tidak menghasilkan ini kemudian dialihkan dari Perhutani kepada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Pengalihan tersebut memang didasarkan atas keputusan pemerintah dan karena Taman Nasional adalah konsep yang baru saja muncul di Indonesia. Pada dekade 1980-an, pemerintah Indonesia atas desakan dari pihak luar dan juga dalam negeri memutuskan untuk mengeluarkan peraturan mengenai keaneka ragaman hayati. Desakan ini datang dari berbagai pihak seperti lembaga internasional, pendonor, NGO, kaum konservasionis, dan lintas komunitas dengan ide *fantasi hijau* yang melekat pada keaneka ragaman hayati Indonesia (Darmanto & Setyowati, 2012, hal. 194; Li, 2012, hal. 239; Miles & Permana, 2013, hal. 107). Pemerintah menanggapi desakan tersebut dengan membuat undang-undang. Secara resmi UU Konservasi Alam Tahun 1990 dikeluarkan oleh pemerintah (Darmanto & Setyowati, 2012, hal. 195) sebagai jalan untuk mengatur ulang wilayah hutan dan tentunya klaim untuk kepentingan jangka panjang. Bersamaan dengan itu, Taman Nasional dibentuk untuk merepresentasikan pandangan negara atas hutan. Tujuan konservasi yang harus didukung oleh kemandirian finansial Taman Nasional membuat pada tahun 1992 komersialisasi dimulai dengan cara membuat standarisasi tarif masuk kawasan konservasi diseluruh Taman Nasional (Cochrane, 1997).

1 Jagawana merupakan istilah petugas penjaga kawasan hutan yang dipekerjakan oleh Perhutani. Pasca Perhutani tidak lagi mengelola Pegunungan Tengger maka jagawana ini tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai penjaga hutan dan digantikan oleh petugas dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS).

Tabel 1.1 Tabel periode waktu pandangan serta tindakan "pemilik hutan" atas kawasan hutan di Ranu Pani

| Periode Waktu | Pandangan dan Tindakan atas Hutan |
|-------------------------------------|--|
| Kolonial (1889 – 1940-an) | Tidak produktif. |
| | Salah satu sumber ancaman bencana bagi orang-orang Belanda yang tinggal di kawasan lebih rendah. |
| | Tertutup. Tidak dikomersilkan dengan untuk kepentingan pencegahan bencana. |
| Perhutani (1949 – 1980-an) | Tidak produktif. |
| | <i>Tumpangsari</i> . Dibuka hanya untuk penduduk dengan palawija sebagai tanaman yang boleh ditanam. |
| Taman Nasional (1980-an – sekarang) | Semi produktif. |
| | Konservasi yang lebih efektif disamping juga dapat memberikan pemasukan bagi negara untuk menunjang tujuan konservasi. |
| | Dikelola dengan sistem zonasi. Komersialisasi hutan pada kawasan jalur pendakian Gunung Semeru lewat pariwisata. |

Di Hutan Ada Uang dan Tenang

Laporan yang ditulis pada tahun 1997 oleh salah seorang peneliti Inggris menunjukkan kawasan Bromo Tengger Semeru menjadi destinasi wisata paling banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun internasional (Cochrane, 1997). Korelasi yang dapat ditarik setelah laporan tersebut ditulis bahwa dalam jangka waktu hampir 20 tahun kawasan Bromo Tengger Semeru tetap populer sebagai tujuan destinasi pariwisata. Selain kawah Gunung Bromo, pendakian Gunung Semeru menjadi daya tarik pariwisata yang tidak pernah sepi pengunjung.

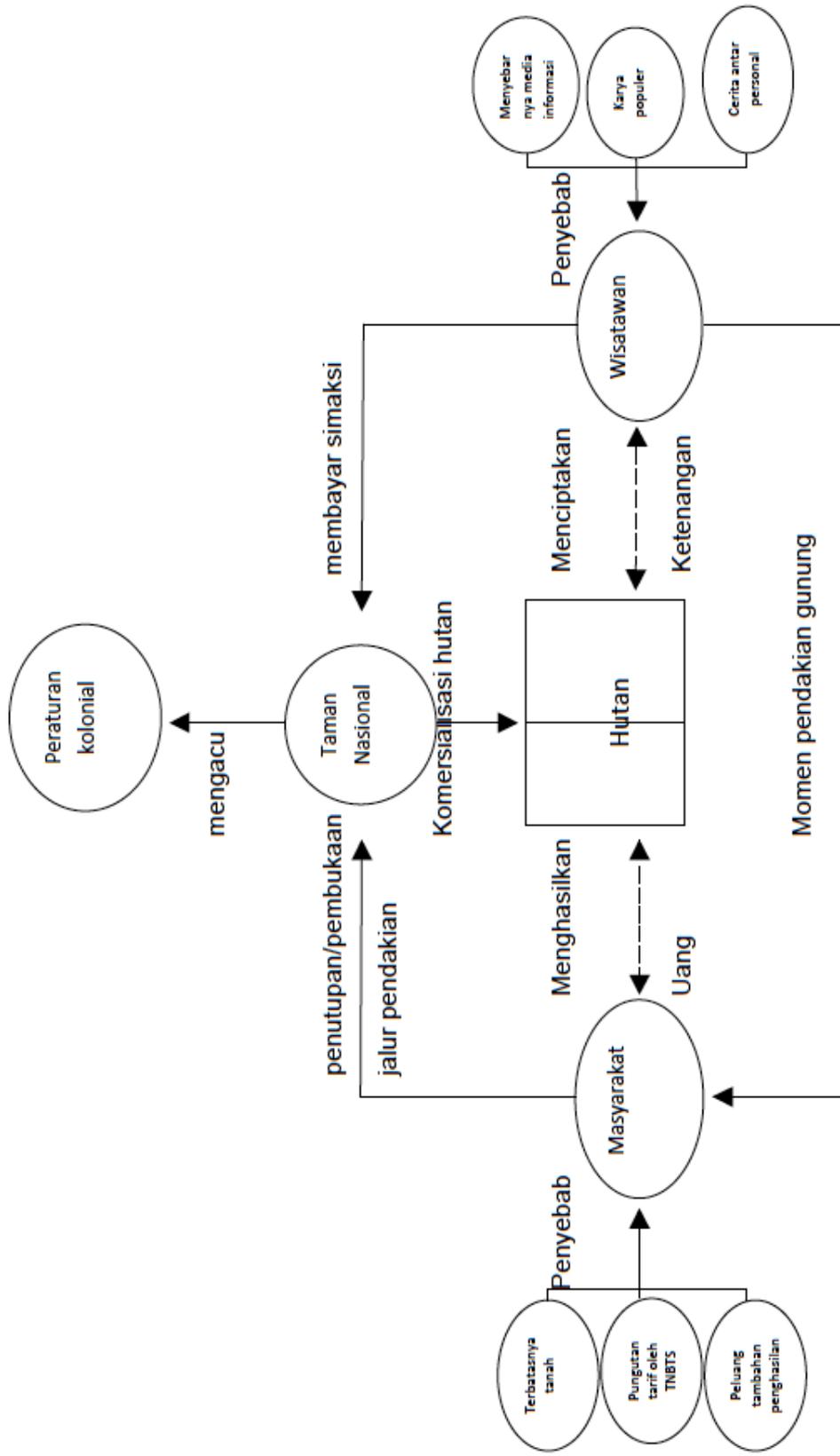
Setidaknya ada 4 elemen penting dalam pariwisata, yaitu “... (i) *travel demand*, (ii) *tourism intermediaries*, (iii) *destination influences*, (and) all of which lead to (iv) *range of impacts*...” (Burns, 2005, hal. 23). Dalam kegiatan pendakian Gunung Semeru hubungan dari tiap elemen tersebut minim kontribusi dari masyarakat setempat. Masyarakat hanya mendapat jatah pada elemen akhir yaitu pengaruh dan tidak mempengaruhi elemen-elemen lain. Model wisata pendakian gunung tidak menempatkan desa sebagai destinasi. Para wisatawan menginap di jalur pendakian. Cerita mengenai pos sepanjang jalur pendakian lebih (dibuat) menarik dari pada wilayah desa. Kontribusi masyarakat terbatas hanya menjadi *porter* bagi para pendaki gunung.

Peluang tidak hadir begitu saja. Kembali pada laporan seorang peneliti yang dibuat tahun 1997, tujuan dari TNBTS adalah membuat sebuah kawasan hasil sinergi dari konservasi dan rekreasi (Cochrane, 1997). Ada banyak citra rekreasi yang lebih besar dibangun ketimbang konservasi, khususnya pada kawasan Gunung Semeru. Setidaknya ada banyak karya populer yang mengacu pada Gunung Semeru sebagai sumber inspirasi. Biografi dan film layar lebar seorang aktivis juga pendiri MAPALA UI “GIE” yang menceritakan bagaimana hubungan antara sang aktivis dengan Gunung Semeru (Gie, 1983). Puncak Gunung Semeru, yang biasa disebut Mahameru, menjadi tempat yang dianggap cukup bermakna karena dipercaya sang aktivis meninggal dunia disana. Kemudian lagu dari grup band Dewa 19 yang berjudul “Mahameru”. Gunung Semeru kemudian direpresentasikan oleh pencipta dan dinyanyikan grup band tersebut kemudian diperdengarkan pada khalayak luas. Kemudian paling akhir adalah novel dan film layar lebar berjudul “5cm” dimana setting cerita dan pengambilan gambar berada di Gunung Semeru, lengkap dengan cerita pengalaman pendakian ketika 17 Agustus.

Citra rekreasi yang menjadi daya tarik wisatawan tidak lepas dari aktivitas yang berlawanan dari kehidupan sehari-hari. Wisatawan yang datang sebagian besar berasal dari kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya. Para wisatawan datang berkelompok dengan membawa identitas sebagai “pecinta alam”. Hal ini didukung oleh regulasi TNBTS yang tidak memperbolehkan kegiatan pendakian gunung dilakukan oleh satu orang. Dalam perspektif ini wisatawan masuk pada kategori pecinta alam karena kegiatan yang dilakukan mencakup perspektif kaum urban akan sesuatu yang tidak mereka temukan di wilayah perkotaan. Apa yang dilakukan kelompok ini selayaknya melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dan merayakan kebebasan di “luar ruang” (Tsing, 2005, hal. 122). Persepsi kontras mengenai “alam” yang “bebas” dan “tenang” dengan tempat rutinitas sehari-hari mereka membuat kriteria ruang yang saling berlawanan.

Karya populer setidaknya dapat menstimulus para wisatawan untuk berkunjung. Ketika tahun 2014 TNBTS sampai harus memberlakukan pembatasan jumlah pendaki setiap harinya hanya 500 orang. Bahkan dalam momentum seperti tahun baru atau 17 Agustus jumlah pendaki mencapai 1000-1500 orang. Hampir setiap hari selalu ada rombongan pendaki yang mendaftar. Tidak terkecuali ketika hari raya Idul Fitri dimana para pendaki sudah datang ke pos perijinan Ranu Pani sejak semalam sebelumnya dan pagi harinya padahal loket masih tutup hingga pukul 11.00. Dengan tarif masuk kawasan yang cukup mahal, TNBTS menjadi salah satu Taman Nasional dan destinasi wisata alam yang dikatakan cukup sukses dengan jumlah kunjungan paling tinggi dari wisatawan domestik maupun mancanegara (Cochrane, 1997) (Hakim, 2011, hal. 71).

Tingginya jumlah wisatawan yang dikenakan tarif setiap kali berkunjung baru terjadi pada era Taman Nasional. Sebelumnya bagi siapapun yang datang ke Ranu Pani untuk mendaki gunung ataupun sekedar ke desa tidak dipungut biaya. Hal inilah yang menjadi pemicu utama adanya pandangan penduduk bahwa hutan menyediakan sumber pendapatan uang. Sebelumnya hutan bagi masyarakat tidak pernah dibayangkan sebagai sumber pendapatan berupa uang. Hutan dimanfaatkan dengan dikumpulkan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kayu bakar, *kulup* (sayur-sayuran liar) dan *kemlandingan* (sejenis petai gunung biasa digunakan untuk *sambal*). Masyarakat mengandalkan ladang sebagai satu-satunya sumber mendapatkan uang. Semakin sempit ladang yang mereka miliki hari ini, memicu masyarakat untuk mencari sumber pendapatan lain yang cukup menjanjikan.



Skema 1.1 Skema perbedaan persepsi atas hutan dengan faktor penyebab dan pendukungnya.

Keterbatasan lain yang dialami masyarakat adalah luas lahan. Taman Nasional memiliki aturan kuat dalam hal pengelolaan batas. Penggunaan patok (*tapal batas*) menjadi penanda kuat batas antara milik Taman Nasional dengan masyarakat. Batas tersebut tidak akan diubah dalam jangka waktu yang lama, namun penduduk di Ranu Pani terus bertambah. Ladang yang sudah ada harus dibagi-bagi sebagai warisan ke generasi selanjutnya, jelas jumlahnya semakin sedikit. Masyarakat harus mencari cara untuk mendapatkan peluang menambah penghasilan, salah satunya dengan menjadi *porter* ketika musim pendakian.

Hutan yang menjadi ramai oleh lalu-lalang pendaki gunung menjadikan persepsi yang kontras juga bagi masyarakat. Masyarakat tidak lagi masuk hutan hanya untuk sekedar mencari kayu bakar ataupun tumbuh-tumbuhan. Kini masyarakat masuk hutan dengan tujuan mencari uang dengan menjadi *porter*. Hutan menjadi ruang yang komersial tidak hanya sebagai sampingan. Setidaknya masyarakat yang menjadi *porter* adalah mereka yang berusia muda dan berjenis kelamin laki-laki. Banyak dari masyarakat mengharapkan pariwisata sebagai sumber pendapatan mereka di waktu yang akan datang karena ladang tidak mungkin bertambah luas.

Kawasan hutan di Ranu Pani tidak pernah diakui oleh masyarakat sebagai “milik” mereka. Bagi masyarakat, kawasan hutan sudah sejak awal mereka tinggal, pada era pasca kemerdekaan, adalah milik negara. Kawasan ini dimiliki oleh negara yang dapat dimanfaatkan tapi tidak dapat dimiliki dan dibuat menjadi ladang. Sejak masa awal pembukaan ladang, sudah ada area yang tidak dapat dijadikan ladang. Area Danau Ranu Pani dan Ranu Regulo dapat dikatakan sebagai kawasan “hutan”. Penduduk tidak dapat mengintensifkan kawasan ini seperti halnya ladang. Mereka harus memiliki ijin resmi dari pengelola kawasan “hutan” ini untuk memanfaatkan area tersebut. Segala aktivitas penduduk yang dilakukan pada kawasan “hutan” akan diawasi oleh petugas terkait dengan aturan yang berlaku. Jika aturan tersebut dilanggar, maka penduduk akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau bahkan jalur hukum ketika mengulangi kesalahan sama. Sanksi ini sudah disepakati oleh pemerintah desa yang menaungi penduduk secara institusional.

KESIMPULAN

Persepsi atas hutan bagi masyarakat Ranu Pani terbangun dari berbagai pandangan. Adanya hubungan yang saling terkait antar aktor dengan berbagai pandangan menjadikan ruang tidak lagi memiliki persepsi statis. Hutan tidak lain adalah tempat, tidak sekedar ruang yang abstrak. Namun hutan menjadi tempat yang menggambarkan sepotong kompleksitas hubungan antara manusia dengan tempat itu sendiri (Retsikas, 2007, hal. 982). Persepsi hadir tidak hanya dalam bentuk potongan-potongan imajinasi.

Persepsi menjadi sebuah bentuk nyata yang terus berhubungan dengan pandangan. Hubungan antara manusia dengan non-manusia disekitarnya terkait dalam hubungan saling membentuk (Ingold, 2000). Pandangan atas hutan di Ranu Pani oleh masyarakat yang berubah tidak berdasar dari faktor bersifat satu arah. Titik penting dalam perubahan persepsi ini berasal dari faktor internal yang diperkuat faktor eksternal. Kepemilikan hutan yang ada pada TNBTS dan regulasinya, semakin terbatasnya ladang, dan juga peran aktif wisatawan dalam membentuk hutan merupakan kompleksitas pembentukan kawasan hutan di Ranu Pani hari ini.

Selain itu terlihat bahwa pandangan atas hutan memiliki sifat yang kontras antara masyarakat dengan wisatawan (pecinta alam) namun saling berhubungan. Peran yang kemudian dimainkan oleh TNBTS dalam persepsinya atas hutan cenderung sulit menjangkau langsung wisatawan dan masyarakat. Hal ini menjadikan tujuan konservasi dan rekreasi dapat mendukung satu sama lain cenderung ambisus bagi Taman Nasional. Adanya pembatasan yang dilakukan oleh Taman Nasional atas hutan dan ladangkemudian mendapat respon dari masyarakat untuk membuka batas tersebut (Vandergeest & Peluso, 1995) dengan cara menjadikan hutan sebagai tempat mencari uang. Akhirnya kedua tujuan tersebut lebih banyak menunjukkan sifat kontradiktif dibanding melengkapi antara konservasi dan rekreasi.

REFERENSI

- Boomgaard, P. (1999, October). Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1880-1949. *Environment and History*, Vol. 5, No. 3, 257-292.
- Burns, P. (2005). *An Introduction to Tourism and Anthropology*. New York: Routledge.
- Cochrane, J. (1997). *Tourism and conservation in Bromo Tengger Semeru national park*. University of Hull, UK.
- Crang, M., & Cook, I. (2007). *Doing Ethnographies*. London: SAGE Publication Ltd.
- Darmanto, & Setyowati, A. B. (2012). *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta: KPG.
- Fath, R. A. (2013). *Persepsi Petani Terhadap Pendangkalan Danau dan Hubungannya Terhadap Produktivitas Lahan Pertanian (Studi Kasus Pendangkalan Danau Ranupani, Desa Ranu Pani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang)*. Malang: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya.
- Gie, S. H. (1983). *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Hakim, L. (2011). Cultural Landscapes of the Tengger Highland, East Java. Dalam S.-K. Hong, J. Wu, J.-E. Kim, & N. Nakagoshi, *Landscape Ecology an Asian Cultures* (hal. 69-82). Tokyo: Springer.
- Hefner, R. W. (1999). *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Hirsch, E. (1995). Landscape: Between Place and Space. Dalam E. Hirsch, & M. O'Hanlon, *The Anthropology of Landscape: Perspective on Plcae and Space* (hal. 1-30). New York: Oxford University Press, Inc.
- Ingold, T. (2000). *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling, and Skill*. London and New York: Routledge.
- Li, T. M. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia (terj.)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peluso, N. L. (2006). *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan sumberdaya dan perlawanan di Jawa*. Jakarta: Konphalindo.
- Radecki, J. M. (2006). *Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Nasional: Studi Kasus; Desa Ranu Pani, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru*. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Retsikas, K. (2007). Being and Place: Movement, Ancestors, and Personhood in East Java, Indonesia. *The Journal of Royal Anthropological Institute*, Vol. 13 No. 4, 13, 969-986.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi (terj.)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Suryanata, K. (1999). From Home Garden to Fruit Gardens: Resource Stabilisation and Rural Differentiation in Upland Java. Dalam T. M. Li, *Transforming the Indonesia Upland: Marginality, Power, and Production* (hal. 257-280). Amsterdam: Harwood Academic Publishers.

Tsing, A. L. (1998). *Dibawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing (terj.)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tsing, A. L. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Urry, J. (1990). *The Tourist Gaze*. London: SAGE Publication Ltd.

Vanderveest, P., & Peluso, N. L. (1995). Territorialization and state power in Thailand. *Theory and Society* 24 , 385-426.

Wessing, R. (1995). The Last Tiger in East Java: Symbolic Continuity in Ecological Change. *Asian Folklore Studies* , 191-218.

Film

Mantovani, Rizal (Sutradara). 2012. *5cm*. Soraya Intercine Films.

Riza, Riri (Sutradara). 2005. *Gie*. SinemArt Pictures.

Lagu

Dewa 19. 1994. *Mahameru*. Jakarta. Aquarius Musikindo.

Peta

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS).